

KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE MALAYSIA

Aelina Surya

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung
Jl. Dipatiukur Bandung

Email: Aelina_gallery@yahoo.com

Abstrak

Salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri melalui penyelenggaraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, yang meliputi persiapan, penempatan dan pengembalian TKI dari Malaysia. Penyelenggaraan tersebut menimbulkan berbagai masalah, yang tidak jarang menyulut berbagai ketegangan baik antar negara dan antara TKI dengan Pengguna (*employers*), terutama: (1) sosialisasi tentang *job order* dan penjelasan kebutuhan TKI tidak ada informasi lengkap; (2) tidak semua TKI memiliki sertifikat keterampilan sebagaimana disyaratkan, sehingga kompetensinya dibawah standar kebutuhan *employers*, yang berakibat pada rendahnya gaji; (3) jalur pembinaan terputus; (4) kesan tentang pengguna (*employers*) terhadap TKI: pelupa, bodoh, ingin selalu yang mengerjakan yang mudah, kerja menurut kehendaknya sendiri, sukar diberi pengarahan, dan mudah terpengaruh; (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih pada penyaluran tenaga kerja ; (6) minat untuk bekerja di luar negeri adalah tamatan SMU, maka bobot pengetahuan untuk kelangsungan kerja harus diletakkan pada tingkat itu, agar kualitas pendidikan mampu diaplikasikan; (7) negara fokus perhatian penganggur Indonesia adalah Malaysia dan Saudi Arabia; (8) masih terdapat jumlah tenaga kerja yang belum tersalurkan sekalipun dalam *job order* jumlah permintaan TKI banyak. Timbulnya masalah-masalah tersebut disebabkan kurangnya koordinasi diselenggarakan antar unit-unit Organisasi baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Abstract

One of Indonesian Government's program to increase social welfare is by decreasing domestic unemployment rate through The Handling of The Indonesian Workers to Malaysia which includes the preparation, placement and returning programs of Indonesian workers. Where sometimes causing a lot of problems and provoking some tensions both bilaterally between Indonesia and Malaysia, and between Indonesian workers and their employers, mainly are as follows : (1) The socialization about job order consisting of explanation of the needs of Indonesian workers during their work time in Malaysia has not been well undertaken, so that they were not well informed. (2) Not all of Indonesian workers migrating to Malaysia have good skills and have been certified, therefore their competencies are under the standard of employers, causing them underpaid; (3) The flow of information to the Indonesian workers was not smooth since the supervision path was broken off. (4) The impressions of employers upon the characteristics of Indonesian workers : the Indonesian workers are senile, foolish, always want to do the easier job, do the job as they want, difficult to be supervised, susceptible to be influenced as well; (5) Labor and Transmigration Department more emphasized toward and focused on labor channel, causing the Indonesian

workers remained unskilled; (6) The biggest number of applicants who want to work abroad are the High School Graduates, so the weight and the quality of education should be put upon that stage and eventually should be applicable; (7) The destination countries which have been the focus of those applicants are Malaysia and Saudi Arabia; (8) There are many applicants who are not proceeded yet eventhough according to job order there are still a lot of demands of Indonesian workers. The problems are caused by inadequacy and low quality of coordination.

Keyword : Indonesian Workers, Employer and Coordination.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan dunia, yang ditandai dengan berbagai perkembangan konsep dan paradigma baru, yang ditunjang pula oleh proses globalisasi yang merangsang kompetisi, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan suatu kehidupan dunia baru yang tanpa batas (Kristiadi, 1997: 4), dengan istilah lain lahirnya era globalisasi yang memiliki pengaruh yang cukup luas termasuk dalam bidang Penyelenggaraan TKI, sebagaimana dijelaskan oleh Jones (2000:1) bahwa:

“Globalization served to increase labor migration in the region: the International Labor Organization (ILO) estimated that in 1995, between six and seven million Asians were working abroad, with some two million leaving their countries legally each year” (Globalisasi ditandai meningkatkan tenaga kerja migrasi pada suatu wilayah, ILO memperkirakan bahwa dalam tahun 1995, antara enam sampai tujuh juta orang-orang Asia telah bekerja di luar negeri, dengan lebih dari 2 juta orang tinggal di negara-negara mereka secara tidak legal (resmi) dalam setiap tahunnya).

Kondisi Indonesia sampai saat ini menunjukkan masih belum kondusif, atau masih belum siap untuk menjalaninya, hal ini dapat terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan yang terus meningkat, sehingga masih adanya ketergantungan negara Indonesia dari negara luar;
- 2) Kondisi poin (1) mendorong Perusahaan yang tidak mampu mempertahankan usahanya, untuk melakukan restrukturisasi, likuiditas dan mergerisasi, baik perusahaan swasta maupun BUMN, yang hal ini sering melahirkan gejolak politik dan ekonomi, yang bukan hanya melahirkan peningkatan jumlah pengangguran akan tetapi juga menimbulkan gejolak ketidakamanan, sehingga pada gilirannya hal ini menghambat hasrat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- 3) Meningkatnya tuntutan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas; Hal ini disebabkan sebagai konsekuensi dari persaingan yang menuntut perlunya sumber daya yang memiliki kemampuan (kompetensi) guna menjalani persaingan tersebut;
- 4) Di sisi lain kualitas SDM yang dihasilkan dari pendidikan dan latihan di Indonesia, masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- 5) Rendahnya kompetensi SDM sebagaimana poin 4) di atas, disebabkan faktor kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah, sedangkan biaya pendidikan cukup mahal, sehingga berakibat tidak terjangkaunya pembiayaan tersebut, atau di luar kemampuan masyarakat. Kedua faktor ini (yaitu pendidikan dan kemampuan ekonomi), satu sama lainnya sangat erat

hubungan sebab akibatnya, dimana rendahnya pendidikan berakibat rendahnya pendapatan, dan rendahnya pendapatan berakibat rendahnya pula kemampuan untuk mengikuti pendidikan.

- 6) Euforia demokrasi yang melahirkan anggapan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang, tetapi kemudian mengarah kepada kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa batas, melakukan tindakan tanpa batas, sebagai contoh dengan adanya demonstrasi di jalanan yang terkadang mengarah kepada keberutalan, yang merusak tatanan ekonomi yang telah dibangun.

Kondisi tersebut sebagaimana butir (1) s/d (6) itu, bukan hanya sebagai gejala yang menunjukkan tidak kondusifnya Indonesia dalam menjalani perkembangan “dunia tanpa batas”, namun juga menunjukkan kondisi belum terwujudnya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. Adapun wujud dari tidak sejahteranya rakyat adalah tampak dari kurangnya lapangan kerja, dan pengangguran yang mendorong kemiskinan.

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan dunia yang ditunjang oleh proses globalisasi yang merangsang adanya kompetisi disegala bidang memicu pertumbuhan dan perkembangan dibidang administrasi publik khususnya dibidang ketenagakerjaan (yang menyangkut SDM).

Berdasarkan gejala-gejala yang ada dan berkembang dibidang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang kondusif dalam koordinasi Penyelenggara TKI ke Malaysia yang dilakukan oleh satuan-satuan organisasi yang menangani persiapan, penerimaan dan penempatan TKI ke Malaysia dan pengembalian TKI dari Malaysia, termasuk selain dari kesiapan dari TKI itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dan sejauh mana koordinasi yang seharusnya dilaksanakan dalam penyelenggaraan TKI ke Malaysia ?
- 2) Aspek-aspek apa yang dominan dalam melakukan koordinasi yang baik bagi kelancaran penyelenggaraan TKI ke Malaysia ?
- 3) Pola Koordinasi ideal yang bagaimana yang dapat memperlancar penyelenggaraan TKI ke Malaysia ?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui, memahami dan menganalisis Koordinasi dalam Penyelenggaraan TKI ke Malaysia, sehingga dapat menginventarisir kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang disebabkan oleh adanya Koordinasi atau tidak adanya Koordinasi yang diselenggarakan;
- 2) Mengetahui, memahami, dan menganalisis aspek-aspek yang dominan dari Koordinasi dalam menyelenggarakan TKI ke Malaysia;

- 3) Menggambarkan pola ideal Koordinasi yang harus diselenggarakan dalam Penyelenggaraan TKI ke Malaysia.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1) Dengan diinventarisirnya kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang disebabkan oleh adanya koordinasi atau tidak adanya koordinasi yang diselenggarakan, maka akan dapat dijadikan bahan masukan terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan bagi pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan TKI ke Malaysia, sehingga diharapkan adanya kebijakan publik untuk meningkatkan kekuatan dan peluang bagi penyelenggaraan koordinasi, dan dapat menghapuskan sekurang-kurangnya meminimalisir kelemahan dan ancaman.
- 2) Dengan mengetahui, memahami, dan menganalisis aspek-aspek yang dominan dari penyelenggaraan koordinasi, diharapkan akan memiliki kompetensi untuk melakukan koordinasi yang baik, melalui pelaksanaan aspek-aspek yang baik dan meminimalisir aspek-aspek yang kurang baik.
- 3) Dengan mengetahui pola ideal koordinasi yang harus diselenggarakan, maka sekurang-kurangnya akan memberikan arahan atau pedoman menuju pelaksanaan koordinasi yang baik.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Koordinasi secara konseptual adalah berhubungan dengan kegiatan manusia, baik yang menyangkut sikap koordinasi, tingkah laku, terkoordinasi, sinergitas (penyesuaian diri) dalam berkoordinasi, penyatupaduan manapun hubungan (networking) dalam berkoordinasi satu sama lainnya, agar efektif dalam pencapaian tujuan organisasi (Suganda, 1996:16), dengan demikian menunjukkan bahwa unsur manusia baik selaku pelaku koordinasi, manapun selaku obyek koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini dikuatkan pula dengan pendapat dari Riwu Kaho, bahwa:

“pentingnya faktor manusia pelaksana karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan” (1988:60).

Menurut pendapat Riwu Kaho tersebut ternyata hanya dilihat dari satu sisi saja tentang pentingnya manusia yaitu sebagai subyek. Sebenarnya dalam hubungan pembangunan nasional manusia bukan hanya sebagai subyek, akan tetapi juga sebagai obyek pembangunan dengan istilah lain yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Dari pendapat Winardi, tampak bahwa di dalamnya tersirat tentang perlu adanya keseimbangan antara manusia sebagai subyek dan manusia sebagai obyek. Apabila tidak ada keseimbangan, maka makna pembangunan manusia itu tidak memiliki arti apa-apa, bahkan suatu saat akan mengarah kepada pemerasan manusia terhadap manusia lainnya. Sekalipun pendapat Riwu Kaho tersebut memiliki kekurangan dalam rumusannya, namun esensi dari rumusan tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan sesuatu yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan merupakan salah satu elemen lingkungan untuk melakukan hubungan dan kerjasama satu sama lainnya, sebagaimana Winardi (2000:23) yang mengutip pendapat Herbert G. Hicks, mengemukakan bahwa:

“manusia merupakan salah satu elemen dari lingkungan di samping elemen lainnya berupa sumber-sumber daya fisik dan iklim, kondisi-kondisi ekonomi dan pasar, sikap-sikap, hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Pentingnya faktor manusia harus merupakan subyek Koordinasi dan sebagai obyek koordinasi, manusia sebagai subyek Koordinasi artinya manusia harus melakukan Koordinasi dengan sebaik-baiknya, sedangkan manusia sebagai obyek Koordinasi maka manusia harus memiliki kesiapan dan kemauan untuk dikoordinasikan oleh manusia lainnya.

Keadaan Koordinasi dalam Penyelenggaraan TKI ke Malaysia menunjukkan kondisi yang kurang baik, sehingga penulis menganggap perlu memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana membuat unit-unit Organisasi penyelenggara TKI itu dapat melakukan Koordinasi satu sama lainnya dengan baik.

Batasan pengertian operasional dari Penyelenggara TKI adalah: badan-badan atau lembaga-lembaga dan unit organisasi, yang berupa *Government Organization (GO)* dan *Non-Government Organization (NGO)* yang melakukan kegiatan rekrutmen (yaitu penerimaan, seleksi, penyaluran, penempatan TKI) ke Malaysia dan pengembalian TKI dari Malaysia (gambar 1.3.). Secara rinci di dalam GO yang menjadi subyek penelitian adalah para pejabat atau para birokrat yang ada di dalamnya, yang menurut pendapat Crozler, Selznick, V. Thompson, dan Blau (dalam Gullick, 1980: 38-44), yang menulis “*organizational behavior*” mengemukakan bahwa subyek itu ialah : “*how to design efficient, effective, or productive organizations than with how to analyze and understand existing bureaucracies*. Rumusan ini terarah kepada bagaimana mencari suatu solusi dari masalah organisasi melalui jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana suatu organisasi itu menjadi efisien, efektif atau produktif serta bagaimana melakukan analisis dan memberi arti tentang keberadaan birokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan TKI ke Malaysia itu merupakan mobilitas penduduk Indonesia ke Malaysia yang berbentuk sirkulasi (*circulation*), yang menurut Djadja Saefullah (1999:40) bahwa:

“Sirkulasi adalah perpindahan penduduk bersifat sementara dalam waktu lebih dari satu hari tetapi tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan, baik karena musiman ataupun karena berbagai alasan lain”

Lebih lanjut Djadja Saefullah (1999:41) menjelaskan bahwa bentuk lain dari mobilisasi penduduk adalah migrasi dan Ulang-alik, dan dimaksudkan dengan “migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap (*permanent*)”, sedangkan “mobilisasi Ulang-alik adalah gerak perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam”. Contoh perpindahan penduduk dari Jawa Barat untuk tinggal menetap di daerah Transmigrasi adalah bentuk migrasi, sedangkan para Pejabat Kabupaten Sukabumi yang karena perpindahan ibu kota Sukabumi ke Pelabuhan Ratu, maka mereka setiap hari “bolak balik (Ulang-alik) dari Kota Sukabumi ke Pelabuhan Ratu, yang bekerja di Pelabuhan Ratu, sedangkan tempat tinggalnya masih tetap di Kota Sukabumi. Bentuk mobilitasi sirkulasi adalah TKI ke Malaysia yang bekerja di Malaysia lebih dari satu hari, tetapi mereka tidak bermaksud menetap menjadi warganegara Malaysia dan setelah habis kontrak kerja mereka kembali lagi ke Indonesia.

Dalam hubungannya dengan nomenkelatur Organisasi yang digunakan oleh Pemerintahan Indonesia istilah mobilisasi sekuler, tidak terlihat dengan jelas, namun dikemas atau termasuk ke dalam tugas pokok dari salah satu Departemen yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan demikian yang dimaksud penyelenggaraan TKI ke Malaysia secara operasional dapat diartikan dengan Mobilisasi Sekuler TKI ke Malaysia. Rumusan operasional dari Koordinasi,

sesuai dengan pendapat Winardi (2000: 389) yang menekankan pada komunikasi yang tepat antar komponen satu dengan lainnya, bahwa:

“Koordinasi merupakan proses dimana aktivitas-aktivitas individu – individu dan kelompok-kelompok dikaitkan satu sama lain, guna memastikan bahwa dicapai tujuan bersama. Ia menyediakan komunikasi tepat antara komponen-komponen organisatoris, dan memungkinkan mereka untuk memahami aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain, dan membantu mereka untuk bekerja sama dengan baik dalam arus kerja umum”.

Pada tulisan lainnya Winardi (1993:181) menyatakan bahwa betapa bahayanya apabila Koordinasi tidak dilakukan karena “individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan Organisasi”.

Koordinasi sebagai proses di dalamnya terdapat unsur-unsur adanya: (1) Keterkaitan antara aktivitas-aktivitas individu dan kelompok. (2) Tujuan yang sama yang pencapaiannya perlu dikoordinasikan, karena tanpa hal ini tidak mungkin mau berkoordinasi. (3) Kerjasama dalam mencapai tujuan bersama memerlukan komunikasi yang baik satu sama lain, yaitu hubungan yang harmonis dan penuh dengan kesadaran dan pengertian daripada anggota Koordinasi untuk mencapai perwujudan tujuan tersebut.

Adanya sinkronisasi, harmonisasi atau kesesuaian dari aktivitas atau usaha untuk adanya keselarasan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh beberapa unit organisasi dengan berbagai rambu atau ketentuan yang dikemas dalam suatu sistem berupa petunjuk pelaksanaan, agar suatu kegiatan dapat diketahui dan dimengerti oleh semua pelaku Koordinasi itu. Manakala hal ini tidak terjadi maka tidak mungkin Koordinasi berjalan dengan baik dan tidak mungkin pula ada persamaan persepsi diantara mereka. Tindakan harmonis merupakan kegiatan terkoordinasi baik, manakala terdapat kesatuan arah, seirama antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sekalipun dilakukan oleh unit organisasi yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Setiap Koordinasi yang dilakukan harus memiliki “obyek tertentu”, artinya Koordinasi itu memiliki tujuan, Organisasi yang tanpa tujuan maka Koordinasi yang dilakukan hanya akan merupakan kumpulan orang yang tidak bermakna, karena mungkin tujuan masing-masing berbeda, sehingga dalam suatu organisasi tujuan itu ialah unsur utama yang dimainkan oleh Koordinasi. Koordinasi yang baik dalam ketenagakerjaan adalah Koordinasi yang:

- 1) dapat mencegah dan menghilangkan titik pertentangan antara pengguna jasa (*employers*) dengan para TKI;
- 2) mendorong pelaku Koordinasi untuk berfikir dan berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan bersama;
- 3) mampu mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi usaha dalam pencapaian tujuan;
- 4) mampu mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi para pejabat, karena dalam rangka Koordinasi itu, mereka mau tidak mau harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan tugas secara menyeluruh guna mencapai keseimbangan dan keserasian yang diharapkan.

Koordinasi yang baik, seharusnya dilakukan pada setiap tahapan dari mulai kegiatan persiapan (*preparation*), kegiatan nyata (*concretion*) dan pengawasan (*control*) (Kristiadi, 1997:6). Demikian pula Koordinasi apabila ditinjau dari sudut manajemen memiliki keterkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti dengan Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*), bahkan bukan hanya keterkaitan

yang harus ada, akan tetapi juga harus masuk dalam fungsi-fungsi tersebut, sebagai contoh dalam *planning* antara lain diperlukan adanya Koordinasi dari para pelaksana pembuat rencana (*planner*), Koordinasi yang menyangkut materi perencanaan yang dibuat; Keterkaitan Koordinasi dengan pengorganisasian antara lain contohnya: perlu adanya Koordinasi dalam penyusunan suatu organisasi, menyusun kebijakan yang menyangkut organisasi, menyusun uraian tugas organisasi, menentukan prosedur dan mekanisme kerja organisasi, menentukan SDM yang akan mengisi kegiatan organisasi tersebut (misalnya adanya dewan jabatan); Keterkaitan antara Koordinasi dengan pelaksanaan antara lain: Koordinasi dari setiap unsur pelaksana kegiatan yang berkaitan (misal antara sub bagian keuangan/bendaharawan dengan pelaksana sektor, pelaksana program dan pelaksana proyek, atau antara pelaksana pembangunan jalan dengan pelaksana penggalian saluran kabel telepon dan pelaksana penggalian kabel listrik), demikian pula Koordinasi dalam pelaksanaan ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, yang dimaksud internal adalah Koordinasi diantara para pelaksana pembangunan dalam suatu jenis kegiatan (sektor, program dan proyek), sedangkan Koordinasi eksternal adalah Koordinasi yang dilakukan terhadap unit-unit organisasi di luar unit organisasi kegiatan yang sedang dilakukan (mungkin berbeda sektor, program dan proyek); Demikian pula fungsi Koordinasi harus masuk ke dalam fungsi pengawasan, sebagai contoh antara lain pengawasan terhadap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memerlukan Koordinasi dalam pelaksanaannya, misalnya antara BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pusat) dengan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) dalam hal pemeriksaan keuangannya, melakukan penyusunan jadwal pemeriksaan bersama terhadap suatu SKPD, sehingga waktunya tidak terjadi bersamaan atau memiliki materi pemeriksaan yang sama.

Koordinasi memang merupakan sesuatu yang mudah diucapkan, namun dalam pelaksanaannya sulit untuk dilaksanakan, karena hal itu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan internal maupun eksternal, sebagaimana dijelaskan oleh Winardi (2000:21) bahwa yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah lingkungan yang dapat dikendalikan, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang sulit dikendalikan dan juga sulit diprediksi, seperti kebijakan Pemerintah yang telah keluar merupakan lingkungan eksternal yang sulit dikendalikan oleh penyelenggara TKI, melainkan harus ditaatinya. Demikian pula menurut Sugandha (1996 : 24) di dalam organisasi pemerintahan yang merupakan organisasi terbesar pada suatu wilayah negara, Koordinasi ini di Indonesia lebih-lebih lagi sulitnya untuk diciptakan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi dalam usaha Koordinasi yaitu : (a) Kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya sendiri; (b) Kesalahan anggapan orang mengenai instansi induknya; (c) Kesalahan pandangan mengenai arti Koordinasi sendiri; (d) Kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di Pusat.

Pengamatan Sugandha tersebut menurut penulis adalah sesuai dengan kondisi yang berkembang di Indonesia karena sering terjadinya anggapan yang salah dari anggota unit organisasi yang menganggap bahwa unit organisasi merekalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi sehingga sukar bagi mereka untuk “merendahkan diri “ yang berada dibawah Koordinasi instansi lain atau yang sederajat.

Suatu instansi vertikal sering menganggap bahwa instansi induk atau markas besarnya adalah suatu sumber segala-galanya. Hanya instansi induklah yang berwenang meminta loyalitasnya. Dengan demikian timbul keengganan bila instansi yang sederajat meminta loyalitasnya untuk melakukan kerjasama. Masih banyak orang yang menganggap bahwa kewenangan Koordinasi identik dengan kewenangan komando. Karena itu pada satu pihak yaitu instansi yang mempunyai fungsi tertentu yang berwenang mengkoordinasikan nada permintaan

bantuannya akan lebih bersifat perintah. Pihak yang lain menganggap bahwa perintah seharusnya hanya datang dari atasan (induk) sehingga selalu akan bersikap apatis terhadap ajakan-ajakan berkoordinasi. Pandangan ini bertitik tolak dari fungsi dan tugas pokoknya yang khusus sehingga merasa tidak ada kaitan dengan fungsi dan tugas pokok lainnya. Dengan anggapan bahwa “SOTK” mereka sendiri sudah jelas maka hanya fungsi dan tugas pokoknya sendirilah yang menjadi perhatiannya yang penuh.

3. Objek dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode survei yang ciri-cirinya antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengambilan Populasi terbatas dari Unit Organisasi GO, NGO, TKI dan Majikan/Pengguna;
- 2) Penelitian dilakukan terhadap data sample;
- 3) Terdapat hasil temuan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar Variabel, sosiologis maupun psikologis;
- 4) Adanya generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam;
- 5) Tidak memerlukan kelompok control.

Hal ini sejalan dengan rumusan dari metode survey yang dikemukakan oleh Sugiyono (1997:) yaitu:

”penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan datanya baik primer maupun sekunder tentang obyek penelitian melalui penelitian pustaka dan *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan instrument yang kemudian dianalisis berdasarkan metoda ilmiah, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis”

Sekalipun penelitian ini menggunakan metode survei, dalam pendekatan pengumpulan datanya, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif; Letak penelitian kuantitatif adalah karena data yang dikumpulkan dan dianalisis berbentuk angka-angka yang menghasilkan perhitungan statistik walaupun sifatnya sederhana. Letak penelitian kualitatifnya adalah sebagaimana dimaksudkan oleh Garna (1999:32) bahwa: “Hakekat pendekatan kualitatif akan mengawali ke dua pendekatan penelitian, kualitatif itu sendiri dan kuantitatif, artinya uraian dengan kata-kata dalam tatanan kalimat yang mengungkapkan premis, hipotesis, dan latar belakang pemikiran suatu penelitian. Demikian pula halnya cara pengukuran dan pengujian hasil uji hipotesis, analisis data dan tabel atau skema, serta data statistika lainnya selalu perlu diuraikan dengan jelas melalui uraian kata-kata”.

Sekalipun digunakan dua jenis penelitian berdasarkan pengumpulan datanya, namun titik berat penggunaan metoda dalam penelitian ini adalah terletak kepada penelitian Kualitatif.

4. Pembahasan

Kenyataan yang timbul dari Penyelenggaraan TKI ke Malaysia, tidaklah semudah apa yang diperkirakan, namun cukup banyak menimbulkan berbagai masalah, yang tidak jarang masalah-masalah tersebut menyulut berbagai ketegangan-ketegangan baik antar negara maupun antara TKI dengan Pengguna (*employers*). Masalah ini ialah :(1) sosialisasi tentang *job order* yang memuat penjelasan kebutuhan TKI di Malaysia kurang dilaksanakan, sehingga tidak menerima informasi

lengkap; (2) tidak semua TKI yang dikirimkan memiliki sertifikat keterampilan sebagaimana yang disyaratkan, sehingga kompetensinya dibawah standar kebutuhan *employers*, yang berakibat pada rendahnya gaji; (3) informasi kepada TKI tidak lancar, disebabkan jalur pembinaan terputus; (4) kesan dari pengguna (*employers*) TKI: pelupa, bodoh, ingin selalu yang mengerjakan yang mudah, kerja menurut kehendaknya sendiri, sukar diberi pengarahan, dan mudah terpengaruh; (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah pada penyaluran tenaga kerja, yang akibatnya mereka tak terlatih; (6) minat terbesar untuk bekerja di luar negeri adalah tamatan SMU, maka bobot pengetahuan menunjang kelangsungan kerja harus diletakkan pada tingkat itu, sehingga kualitas pendidikan harus merupakan kualitas yang mampu diaplikasikan; (7) negara fokus perhatian penganggur Indonesia itu adalah Malaysia dan Saudi Arabia; (8) masih terdapat jumlah tenaga kerja yang belum tersalurkan sekalipun dalam *job order* jumlah permintaan TKI cukup banyak, dengan demikian Indonesia tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi; Timbulnya masalah-masalah tersebut disebabkan kurangnya koordinasi diselenggarakan antar unit-unit Organisasi baik GO maupun NGO.

Setelah Peneliti melakukan analisis melalui *logical imperative analysis* dan analisis *SWOT*, maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut: (1) Koordinasi perlu dilakukan secara terus menerus, direncanakan, sederhana, dilakukan sejak awal, melibatkan dari semua pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan TKI ke Malaysia, sehingga dapat merupakan pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku bagi unit organisasi terkait. (2) Terdapat aspek-aspek dominan yang menentukan jalannya Koordinasi dalam persiapan, penempatan, dan pengembalian TKI yaitu: hubungan yang serasi dengan saling pengertian diantara GO dan NGO, terselenggaranya rapat-rapat rutin diantara lembaga-lembaga yang telah ditunjuk dalam penyelenggaraan TKI seperti PJTKI, BKPTKI, BP2TKI dan sebagainya, demikian pula rapat-rapat khusus sesuai dengan kepentingannya dengan semuanya harus melibatkan unsur-unsur terkait, sehingga dalam gerak-langkah setiap unit Organisasi akan tertuju kepada tujuan penyelenggaraan TKI ke Malaysia, sosialisasi dan keterbukaan merupakan modal utama dalam koordinasi. (3) Perlu koordinasi dilakukan berdasarkan pola ideal dari koordinasi dengan mengacu kepada model koordinasi ideal yang memuat target, sasaran, tujuan dan keterlibatan koordinasi yang dalam penelitian ini telah penulis jelaskan dalam materi laporan penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari Penelitian selain mampu membuktikan hipotesis terdapat juga temuan-temuan yang menurut penulis penting untuk disimpulkan. Secara rinci kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dengan Koordinasi yang dilakukan sejak awal kegiatan, secara terus menerus (*continue*), dirancang (direncanakan), dilakukan secara sederhana, dan penuh pengertian dari setiap unit-unit organisasi penyelenggara dapat meningkatkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan TKI ke Malaysia serta dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indoneisa melalui tingkat penghasilannya yang melebihi tingkat penghasilannya di dalam negeri Indonesia.
2. Terdapat aspek-aspek dominan yang merupakan *push factor* dan *full factor* yang dapat menunjukkan arah koordinasi yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan TKI ke Malaysia yaitu: Geografi Indoneisa yang berdekatan, jumlah penduduk yang besar, dan jumlah

pengangguran yang banyak, serta kompetensi Sumber daya manusia Indonesia, Kondisi konyungtur ekonomi Indonesia, perilaku bangsa yang kurang kondusif, bahkan kurang bertanggung jawab, Tingkat Kesejahteraan bangsa dan negara Malaysia jauh lebih tinggi, kemiripan serajah dan budaya bangsa Indonesia dan Malaysia, Keadaan iklim, Penduduk Malaysia yang relatif sedikit, Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pembangunan terutama di sektor industri dan pertanian, Sistem pengupahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia.

3. Melalui Pola Koordinasi yang ideal yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap unit-unit organisasi yang bersifat horizontal, vertikal dan diagonal. dapat meningkatkan dan mengembangkan tertib dan kelancaran dalam penyelenggaraan TKI ke Malaysia.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hasil – hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Kebijakan Praktis

- a. Untuk meningkatkan Koordinasi agar lebih efektif dan efisien perlu diadakan rapat-rapat dari unit-unit terkait (baik GO maupun NGO), baik insidentiel maupun secara periodik untuk membahas usaha pencapaian tujuan dari pengiriman TKI ke Malaysia, dengan mengembangkan konsep transparansi, dan keterkaitan program serta perlu membuat Perencanaan terpadu tentang penyelenggaraan TKI ke Malaysia, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara *continue* (berkesinambungan), dilakukan sejak persiapan dalam penyelenggaraan TKI sampai kembalinya TKI dari Malaysia.
- b. Dengan diketahuinya aspek-aspek dominan dari Penyelenggaraan TKI ke Malaysia merupakan arah koordinasi yang harus dilakukan, karena dalam aspek-aspek tersebut juga menunjukkan fungsinya masing-masing, yang bersifat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, untuk hal ini koordinasi yang perlu dilakukan agar diarahkan kepada sejauhmana memanfaatkan peluang yang ada guna meningkatkan kekuatan-kekuatan, menggeser arah kelemahan menjadi kekuatan, dan mengurangi ancaman seminimal mungkin. Dengan cara demikian maka dapat terjadi kelancaran, ketertiban, penambahan jumlah TKI ke Malaysia, sehingga tidak akan terjadi calon TKI yang berpotensi dan berkemampuan tidak terkirimkan. Sebagai contoh konkret dalam hal ini memanfaatkan letak geografi Indonesia yang berdekatan, yang dapat memudahkan penyelenggaraan koordinasi, maka dapat dilakukan koordinasi yang bersifat horizontal dengan negara Malaysia secara *continue*, mamaksimalnkan atase ketenagakerjaan dan Kedutaan besar RI di Malaysia secara vertical dan secara diagonal melakukan hubungan dengan employers di negara tersebut.
- c. Meningkatkan dan mempersiapkan pelatihan dan pendidikan Calon TKI yang akan dikirimkan ke Malaysia, dengan volume pembekalannya antara lain keterampilan, perilaku individu dan budaya serta gambaran budaya atau perilaku negara yang akan didatangi.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan Ilmu

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep koordinasi yang modern yaitu koordinasi dengan menggunakan model Koordinasi ideal yaitu koordinasi yang bersifat horizontal, vertikal dan diagonal yang dapat meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan TKI ke Malaysia.

- b. Untuk pengembangan sistem global dalam pengembangan ilmu administrasi perlu bekerjasama dengan negara - negara yang mempunyai bidang studi tersebut misalnya penelitian bersama untuk mengatasi masalah yang timbul.guna menghindari misunderstanding dalam hubungan antar negara.
- c. Dalam rangka pengembangan keilmuan supaya diperbanyak buku-buku teks saduran–saduran ilmu administrasi negara khususnya yang menyangkut masalah–masalah koordinasi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Azizah Kassim.1994. *Foreign Labour in Malaysia*. In W. Gooneratne, P.L. Martin & H. Sazanami (Eds), *Regional Development Impact of Labour Migration in Asia*, United Nation Centre for Regional Development. Jepang: Nagoya.
- 1996. *An Overview of Migrant Workers in Malaysia*, Kertas dibentang pada Bengkel Sehari Mengenai Buruh Asing Di Malaysia. Malaysia: IPT-University, 23 Okt 1996.
- Bogdan, Robert, C. and Sari Knopp Biklen. 1990. *Qualitative Research For Education An Introduction To Theory And Methods*, diterjemahkan oleh PAUUT Dan Ditjen Dikti Depdikbud menjadi Riset Kualitatif Untuk Pendidikan, Pengantar Ke Teori Dan Metode. Jakarta: Depdikbud.
- Coulombus, Theodore, A. dan Jones. Alih Bahasa H. Wolfe 1986. Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan Dan Power. New York: Prentice Hall Inc.
- Garna, Judistira K. 1999. *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- , 2000. *Metode Penelitian Sosial, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan: Desain Dan Rencana Penelitian*. Bandung: Primaco Akademika.
- Handyaningrat, Soewarno. 1984. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Jones, Sidney. 2000. *Making Money off Migrants The Indonesian Exodus to Malaysia*, Centre for Asia Pacific Social Tranformation Studies University of Wollongong. Hongkong: Asia 2000 Ltd.
- Junipah Wandu. 1995. *Pendatang Indonesia di Selangor: Proses Penghijrahan Dan Penyesuaian*, Tesis MA, Jabatan Antropologi dan Sosiologi. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Kristiadi, JB. 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*. Bandung: UNPAD.
- Mantra, Bagoes Ida. 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari desa ke kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Martin, PL. 1989. *Labor Migrations and Economic Development, Working Papers, Economic Development*. Washington DC: Commission for the study of international migration and cooperative.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Rangkuti, Freddy. 2002. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rogers, R. 1992. *The politics of migration in the contemporary world, international Migrations, xxx. special issue migration and health in the 1990 s*. Kualalumpur: Southeast Asian affairs ISEAS.
- Rosenau, J. N., Thomson and W. Kenneth. 1976. *World Politic: An Introduction The Free Press*. New York: A Division Of Macmillan Publishing Co.
- Saefullah, Djadja, A. 1992. *The Impact of Population Mobility on Two Village communities of West Java, Indonesia*. Australia: The Flinders University.
- 1999. *Konsep dan Metode Pemberian Pelayanan Umum yang Baik*. Jakarta: Kerjasama Depdagri dan Fisip UNPAD/Dirjen PUOD.
- Siagian, SP. 1978. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- 1982. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- 1985. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stahl, CW. 1986. *International Labour Migration, A Study of The ASEAN Countries, Occasional Paper*. New York: Center For Migrations Studies.
- Sugandha, Dann. 1996. *Sistem Pemerintahan dan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Penerbit Parahyangan.
- 1981. *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Koordinasi dan sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Ramadan Citra Grafika.
- 1998b. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan. Citra Grafika.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: bina Cipta
- 1996. *Kepala Daerah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Terry, George. 1970. *Principles of Management*, disadur oleh Winardi, Azas-azas Manajemen. Bandung: Alumni.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan dan formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Winardi, J. 1970. *Pengantar Tentang Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Nova.

-----1981. *Pengambilan Keputusan Dalam Bidang Manajemen*. Bandung: CV Sinar Baru.

-----1991. *Kreativitas dan Teknik-teknik Pemikiran Kreatif dalam bidang Manajemen*. Bandung: Citra Adytia Bakti.

-----1992. *Organisasi Perkantoran dan Motivasi*. Bandung: Alumni.

-----2000. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.

Dokumen

Dokumentasi Depnakertrans RI. 2003. *Neraca Tenaga Kerja*. Tahun 2000-2003.

----- 2003. *Neraca Perdagangan Indonesia-Malaysia*. Tahun 2002-2003.

-----1997. “Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”, Makalah, Seminar Perhimpunan Pelajar Indonesia Universiti Malaya, 22/8/1997.

Dokumentasi Deplu RI di Malaysia. 2002-2003. Laporan KBRI, Buku I dan II, Kuala Lumpur.

Dokumentasi Deplu RI – Unpad. 1998. Hasil Penelitian Bersama Upaya Perwakilan RI dalam Promosi/Pemasaran Jasa TKI Sektor Formal : Kaitannya dengan Penanggulangan Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia.

Saefullah, A.Djadja. 2000. Materi Kuliah Administrative Behaviour. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-204/Men/1999. Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Bandung: Focus Media.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004, Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Sumber Lainnya:

www.dfa-deplu.go.id

www.apjati.or.id

www.info-ri.com

www.bps.go.id

www.indonesia.go.id

www.wordinformation.com/world/asia/malaysia.

www.nakertrans.go.id

